

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

LEGAL MEMORANDUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Hotben Gultom
NPM : 41151015170265**

Program Kekhususan : Hukum Keadanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hotben Gultom
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015170265
Jenis Penulisan Tugas Akhir : *Legal Memorandum*
Judul Penulisan Tugas Akhir : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Hotben Gultom
NPM. 41151015170265

ABSTRAK

Terdapat beberapa isu hukum berkenaan dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi Polisi Indonesia, dalam rangka memecahkan permasalahan rumit, polisi profesional diperlukan. Adalah penting bagi polisi untuk memahami aturan hukum, konsep hukum dan doktrin hukum, yang telah dikembangkan, tujuannya adalah untuk menghindari kesesatan dalam penegakan hukum. Adapun permasalahan hukum dalam *legal memorandum* ini adalah apakah terhadap Meta Susanti dan dr. Onni Habie, MARS yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dapat diterapkan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 64, dan Pasal 415 KUHP serta Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ? serta bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Meta Susanti dan dr. Onni Habie, MARS yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi ?

Metode penulisan *legal memorandum* ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-concreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peristiwa tindak pidana korupsi dana klaim BPJS UPT RSUD Lembang tahun anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS, telah cukup memenuhi rumusan delik dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55, Pasal 56, Pasal 64 dan Pasal 415 KUHP. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan dan penahanan, serta menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

ABSTRACT

There are several legal issues regarding the duties and functions of the Indonesian Police, in order to solve complex problems, professional police are needed. It is important for the police to understand the rule of law, legal concepts and legal doctrines, which have been developed, the aim of which is to avoid misleading in law enforcement. The legal issues in this legal memorandum are whether to Meta Susanti and Dr. Onni Habie, MARS suspected of having committed a criminal act of corruption can be applied Article 55, Article 56, Article 64, and Article 415 of the Criminal Code as well as Article 2, Article 3, and Article 8 of Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes? as well as how legal actions can be taken by the Police against Meta Susanti and Dr. Onni Habie, MARS suspected of committing a crime of corruption?

The legal memorandum writing method uses grammatical interpretation, that is, interpreting verbatim from legislation relating to the problem to be discussed and normative juridical research methods are linked to the opinions of jurists aiming to find the principles and foundations of positive legal philosophy as well as finding law in concreto, this research refers to legal documents in the form of primary legal materials namely legislation relating to the issues to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is analytical descriptive, which is describing facts which are then analyzed using existing regulations.

The results of the study concluded that the crime of corruption funds claim BPJS UPT Lembang Hospital 2017 fiscal year allegedly carried out by Meta Susanti and Dr. Onni Habie, MARS, has sufficiently fulfilled the offense formulations in Article 2, Article 3, and Article 8 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption and Article 55, Article 56, Article 64 and Article 415 of the Criminal Code. Actions that can be taken by the National Police of the Republic of Indonesia of West Java Region, against perpetrators of corruption, namely Meta Susanti and Dr. Onni Habie, MARS, which is conducting investigations, investigations, arrests, examinations and detention, and submitting case files to the Prosecutor's Office for prosecution.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul :
TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Meima., S.H., M.Hum., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis serta istri penulis dan anak-anak penulis yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. (aamiin)

Bandung, 11 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

LEGAL MEMORANDUM

BAB I : KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

- A. Kasus Posisi1
- B. Permasalahan Hukum11
 - 1. Apakah terhadap Meta Susanti dan dr. Onni Habie, MARS yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dapat diterapkan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 64, dan Pasal 415 KUHP serta Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
 - 2. Bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Meta Susanti dan dr. Onni Habie, MARS yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi ?

BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN

- 1. Pasal 55 KUHP13
- 2. Pasal 56 KUHP13
- 3. Pasal 64 KUHP14
- 4. Pasal 415 KUHP14

5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	15
6. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	15
7. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	16
8. Pasal 1 butir 2 KUHAP	15
9. Pasal 1 butir 5 KUHAP	15
10. Pasal 1 Butir 20 KUHAP	16
11. Pasal 5 KUHAP	17
12. Pasal 7 KUHAP	18
13. Pasal 8 KUHAP	19
14. Pasal 20 KUHAP	19

BAB III : TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	29
C. Pengertian Ajaran Penyertaan	35

BAB IV : PENDAPAT HUKUM

A. Terhadap Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS Yang Diduga Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dapat Diterapkan Pasal	
--	--

55, Pasal 56, Pasal 64, dan Pasal 415 KUHP serta Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana	38
B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS Yang Diduga Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi	46
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	49
B. Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

MEMORANDUM HUKUM

Kepada : Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat
Reserse Kriminal Khusus

Dari : Hotben Gultom

Perihal : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA

Tanggal : 11 Februari 2020